



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FINARI MANAN**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **105028**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.560.000.000

1. Tanah Seluas 205 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 248 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/37 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/37 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
8. Tanah Seluas 224 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 445 m2/182 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 355.000.000

1. MOBIL, HRV X Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. LAINNYA, ELEMEN PIKES SELI Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.



15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	380.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	312.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.607.000.000
III. HUTANG	Rp.	220.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.387.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.